



**2024**

**LKJIP**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

[www.setda.natunakab.go.id](http://www.setda.natunakab.go.id)

## KATA PENGANTAR



Dengan penuh hormat dan kesungguhan, kami dengan bangga mempersembahkan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2024 ini sebagai cerminan dari upaya dan dedikasi yang telah kami lakukan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dengan segala kerendahan hati menghadirkan laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas kami kepada publik atas pengelolaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat daerah. Melalui dokumentasi kinerja ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai capaian, tantangan, serta rekomendasi perbaikan untuk masa depan yang lebih baik.

Laporan ini mencerminkan perjalanan kami dalam menjalankan fungsi dan peran penting Sekretariat Daerah sebagai penggerak utama dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan daerah. Dari uraian yang disajikan, dapat terlihat upaya kami dalam memastikan koordinasi yang efektif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah yang kami ambil. Dalam kata pengantar ini, kami ingin menekankan komitmen kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja organisasi guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan penuh semangat, kami menyampaikan laporan kinerja ini sebagai langkah awal dalam upaya kami untuk terus beradaptasi, belajar, dan berkembang demi mewujudkan pemerintahan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai pencapaian, tantangan, serta rekomendasi perbaikan yang perlu kami lakukan di masa mendatang. Semoga laporan ini tidak hanya menjadi sebatas dokumentasi, tetapi juga menjadi landasan bagi langkah-langkah strategis yang akan kami tempuh untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik di hari esok.

Ranai, Januari 2025

Sekretaris Daerah,



**BOY WIJANARKO VARIANTO, S.E.**

NIP. 19770809 200212 1005

## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
1.1. <b>Gambaran Umum Organisasi .....</b>	<b>3</b>
1.2. <b>Aspek Strategis Sekretariat Daerah.....</b>	<b>4</b>
1.3. <b>Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Sekretariat Daerah.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>14</b>
3.1. <b>Capaian Kinerja Utama Organisasi (IKU) .....</b>	<b>14</b>
3.2. <b>Capaian Indikator Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>18</b>
3.3. <b>Realisasi Anggaran.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
4.1. <b>Kesimpulan .....</b>	<b>37</b>
4.2. <b>Rekomendasi .....</b>	<b>38</b>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Organisasi ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan serta kegiatan strategis. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas di Sekretariat Daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal.

Tugas utama Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan serta pengoordinasian administratif terkait pelaksanaan tugas perangkat daerah. Selain itu, Sekretaris Daerah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan administratif yang diperlukan oleh seluruh perangkat daerah. Dengan posisi strategis ini, Sekretaris Daerah tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara Bupati dengan perangkat daerah, tetapi juga sebagai pengendali yang memastikan keselarasan antara kebijakan yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna terdiri dari beberapa elemen yang bekerja secara terkoordinasi. Di puncak struktur terdapat Sekretaris Daerah yang dibantu oleh tiga Asisten yang masing-masing memiliki peran dalam bidang administrasi, pemerintahan, serta pembangunan dan ekonomi. Asisten-asisten ini bertugas untuk mendukung kelancaran operasional di berbagai sektor, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat terintegrasi dengan baik di setiap bagian organisasi.

Selain itu, Sekretariat Daerah juga didukung oleh sepuluh Kepala Bagian yang masing-masing bertanggung jawab dalam bidang-bidang tertentu, seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Kerjasama, Tata Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, PBJ, Organisasi, Umum, dan

Protokol. Kepala Bagian ini membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan daerah. Dengan struktur organisasi yang jelas dan terbagi berdasarkan bidang tugas, Sekretariat Daerah diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **1.2. Aspek Strategis Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah (Setda) merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Setda memiliki peran sentral dalam mendukung kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena perannya yang vital ini, Setda memiliki beberapa aspek strategis, antara lain:

### **1. Koordinasi dan Fasilitasi.**

Koordinasi Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Setda berperan sebagai koordinator utama antar dinas, badan, kantor, dan unit kerja lainnya di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD berjalan selaras dan sinergis, serta tidak terjadi tumpang tindih. Setda memfasilitasi komunikasi, sinkronisasi, dan penyelesaian masalah antar OPD.

Fasilitasi Kepala Daerah, setda memfasilitasi tugas-tugas kepala daerah, seperti menyiapkan bahan rapat, menyusun agenda kegiatan, mengelola informasi, dan menjalin komunikasi dengan pihak eksternal.

### **2. Perencanaan dan Penganggaran.**

Setda terlibat dalam penyusunan kebijakan daerah, baik yang bersifat strategis maupun teknis. Setda memastikan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran selanjutnya adalah setda berperan dalam pengelolaan anggaran daerah, mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga

pengawasan. Setda memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

### 3. Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Kinerja OPD: Setda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta mengidentifikasi potensi masalah dan solusi perbaikannya.

Setda juga bertanggung jawab dalam penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja.

### 4. Administrasi dan Umum

Pengelolaan Administrasi: Setda menyelenggarakan urusan administrasi umum, seperti persuratan, kearsipan, kepegawaian, dan rumah tangga. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran operasional seluruh organisasi pemerintah daerah.

Meskipun bukan tugas utama, Setda juga dapat berperan dalam memberikan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan pengaduan.

### 5. Aspek Strategis Lainnya

Setda juga berperan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan program pengembangan lainnya. Setda juga seringkali mengelola urusan hubungan masyarakat dan protokoler, khususnya dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintah daerah.

### 1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Sekretariat Daerah

Beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang sering dihadapi oleh Sekretariat Daerah saat ini antara lain:

- 1) Koordinasi dan Sinergi Antar OPD yang Belum Optimal
  - a) Tumpang Tindih Program dan Kegiatan: Seringkali terjadi tumpang tindih program dan kegiatan antar OPD karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif. Hal ini menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya.
  - b) Ego Sektoral: Masing-masing OPD cenderung fokus pada pencapaian targetnya sendiri, tanpa memperhatikan sinergi dengan OPD lain. Hal ini menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
  - c) Mekanisme Koordinasi yang Belum Efektif: Mekanisme koordinasi yang ada, seperti rapat koordinasi, seringkali kurang efektif karena kurangnya persiapan, agenda yang tidak fokus, dan kurangnya tindak lanjut.
- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Perlu Ditingkatkan
  - a) Kompetensi SDM yang Belum Memadai: Perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks membutuhkan SDM yang kompeten dan profesional. Namun, seringkali ditemukan SDM yang belum memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam bidang teknologi informasi, perencanaan, dan pengawasan.
  - b) Distribusi SDM yang Tidak Merata: Distribusi SDM antar unit kerja di Setda seringkali tidak merata, sehingga ada unit kerja yang kekurangan SDM sementara unit kerja lain kelebihan.
  - c) Pengembangan Kapasitas SDM yang Kurang Optimal: Program pengembangan kapasitas SDM, seperti pelatihan dan bimbingan teknis, seringkali kurang optimal karena kurangnya perencanaan, anggaran yang terbatas, dan kurangnya evaluasi.

3) Akuntabilitas dan Transparansi yang Perlu Ditingkatkan.

- a) Sistem pengawasan yang belum efektif. Sistem pengawasan internal di Setda seringkali belum efektif dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya penyimpangan.
- b) Kurangnya transparansi informasi. Akses publik terhadap informasi terkait kinerja Setda dan penggunaan anggaran masih terbatas.
- c) Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

4) Perencanaan dan Penganggaran yang Belum Optimal.

- a) Perencanaan yang kurang matang. Perencanaan program dan kegiatan seringkali kurang matang karena kurangnya data dan informasi yang akurat, serta kurangnya partisipasi dari stakeholder terkait.
- b) Pengalokasian anggaran yang kurang efisien. Pengalokasian anggaran seringkali kurang efisien karena kurangnya prioritas dan kurangnya koordinasi antar OPD.
- c) Pengawasan penggunaan anggaran yang belum efektif. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran seringkali belum efektif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan masih tinggi.

## BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna mencakup sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja yang ingin dicapai. Berikut adalah ikhtisar utama dari dokumen tersebut:

### 1. Sasaran Strategis :

- a) Meningkatkan Pembinaan terhadap TPQ/TPA/MDA untuk peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan Masyarakat.
- b) Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan birkorasi yang bersih dan akuntabel.
- c) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah
- d) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

### 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- a) Persentase Pembinaan terhadap TPQ/TPA/MDA
- b) Nilai SAKIP Daerah
- c) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- d) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adapun target rencana kinerja IKU Sekretariat Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Beserta Target Tahun 2024**

SASARAN	INDIKATOR	Target
		2024
Meningkatnya pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	95%
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	76.90
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EPPD dalam LPPD	3.34
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3.48

Dalam pencapaian indikator sasaran, setiap indikator didukung oleh beberapa kegiatan program, sebagaimana terdapat dalam tabel matrik dibawah ini :

**Tabel 2. Program dan Indikator Sasaran Program Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASPROG	INDIKATOR
Meningkatkan Pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	4.01.02 Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya penyelenggaraan Kebijakan Pembinaan Mental Spritual	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	4.01.02 Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Pemerintahan	Pemenuhan indikator LPPD oleh Perangkat Daerah Indeks Kualitas Kebijakan Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan dan Perekonomian	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan
				Tingkat Inflasi Daerah
		4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kelembagaan Nilai Laporan LKJip Setda
	Indeks Kepuasan Masyarakat	4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Daerah

### 1) Meningkatkan Pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah

- **Indikator Sasaran:** Persentase pembinaan TPQ/TPA/MDA.
- **Program:** Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- **Sasaran Program:** Meningkatnya penyelenggaraan kebijakan pembinaan mental spiritual.
- **Indikator:** Persentase peningkatan pembinaan TPQ/TPA/MDA.

### 2) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- **Indikator Sasaran:** Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
- **Program:** Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- **Sasaran Program:** Meningkatnya penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan.
- **Indikator:**
  - Pemenuhan indikator LPPD oleh perangkat daerah.
  - Indeks kualitas kebijakan.
  - Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti.

### 3) Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

- **Indikator Sasaran:** Nilai SAKIP Daerah
- **Program:**
  - Program Perekonomian dan Pembangunan
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- **Sasaran Program:**
  - Meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan perekonomian.
  - Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah.

- **Indikator:**
  - Indeks pengelolaan barang dan jasa.
  - Persentase realisasi pelaksanaan pembangunan.
  - Tingkat inflasi daerah.
  - Indeks kelembagaan.
  - Nilai laporan LAKIP Setda.

#### 4) Indeks Kepuasan Masyarakat

- **Indikator Sasaran:** Indeks kepuasan masyarakat.
- **Program:** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- **Sasaran Program:** Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah.
- **Indikator:**
  - Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP.
  - Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Matrik keterhubungan sasaran dan program ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja, pelayanan publik, serta pengelolaan tata kelola pemerintahan melalui berbagai program dan indikator yang terukur.

Sekretariat Daerah memiliki jumlah pagu anggaran sebesar 76,9 miliar rupiah, dengan pagu pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 15,3 miliar rupiah, atau setara dengan 20% dari total pagu anggaran Sekretariat Daerah. Alokasi pagu pendukung IKU ini menunjukkan komitmen untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja secara terukur dan sistematis, memastikan bahwa sebagian dari anggaran dialokasikan secara khusus untuk mendukung pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Proporsi 20% ini mengindikasikan bahwa seperlima dari anggaran Sekretariat Daerah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan dan perbaikan kinerja organisasi. Untuk lebih jelas komposisi pagu pendukung IKU dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)**

SASARAN IKU	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
Meningkatkan Pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	<b>1.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>10,067,194,255.00</b>	
		<b>1.1.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>10,067,194,255.00</b>	
		1.1.1.Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spritual	10,067,194,255.00	
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	<b>1.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>1,445,942,791.00</b>	
		<b>1.1.Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>222,775,100.00</b>	
		1.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	222,775,100.00	
		<b>1.2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>662,938,881.00</b>	
		1.2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	550,571,520.00	
		1.2.2. Sub Kegiatan Pendokumentasian PHD dan Pengelolaan Informasi Hukum	112,367,361.00	
		<b>1.3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>560,228,810.00</b>	
		1.3.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	444,296,540.00	
		1.3.2. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	115,932,270.00	
		Nilai SAKIP Daerah	<b>2.Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>2,920,238,480.00</b>
			<b>2.1. Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa</b>	<b>1,587,306,680.00</b>
			2.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1,001,576,660.00
			2.1.2. Sub Keg Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	585,730,020.00
			<b>2.2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>1,005,413,000.00</b>
	2.2.1. Sub Keg Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		504,069,240.00	
	2.2.2. Sub Keg Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		501,343,760.00	
	<b>2.3.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>327,518,800.00</b>	
	2.3.1. Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi, Monev kebijakan pengelolaan BUMD, BLUD		129,704,600.00	
	2.3.2. Sub Keg Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		197,814,200.00	
	<b>3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>881,835,862.00</b>	
	<b>3.1. Kegiatan Penataan Organisasi</b>		<b>651,651,542.00</b>	
	3.1.1 Sub Keg Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		271,800,722.00	
	3.1.2. Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	128,004,860.00		
	3.1.3. Sub Keg Fasilitasi Layanan Publik dan Tata Laksana	251,845,960.00		
	<b>3.2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>230,184,320.00</b>		
	3.2.1. Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Pd	230,184,320.00		
	<b>Jumlah</b>			<b>15,315,211,388.00</b>

### 3. Perjanjian Kinerja

Adapun perjanjian kinerja pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 1. dibawah ini :

**Tabel 4. Sasaran dan indikator Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah**

Sasaran	Indikator	Target	Penanggungjawab	Anggaran
Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang disepekat	90%	Kabag Kerja Sama	560,228,810.00
Meningkatkan tata kelola pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	Asisten II	
	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%		
Peningkatan pelaksanaan pengoordinasian kebijakan perekonomian daerah	Persentase implementasi kebijakan perekonomian	100%	Kabag Perekonomian	480,264,470.00
Pelaksanaan pengoordinasian kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase imlementasi kebijakan SDA	100%		
Peningkatan pengawsan terhadap BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang dilakukan pemantauan dan pengawasan	2 Unit		
Meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan pelaporan pelaksanaan anggaran	Persentase tingkat kepatuhan Perangkat Daerah	100%	Kabag Pembangunan	1,235,597,320.00
Meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyerapan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan	95%		
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja sekretariat daeah	Perolehan Nilai AKIP Sekretariat Daeah	B		
Meningkatkan ketepatan pelaksanaan kegiatan Pembangunanna	Persentase proyek infrastruktur yang selesai tepat waktu	80%		
Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan sistem pengadaan	23 Point	Kabag PBJ	1,567,306,680.00
	Kualifikasi Kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa	15 Point		
	Tingkat Kematangan Unit Kerja PBJ	25 Point		
Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi	Perangkat Daerah dengan tata Kelola baik	100%	Asisten III	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase agenda protokol yang sudah terencana yang dapat difasilitasi	85%	Kabag Prokopim	1,443,638,445.00
Terselenggaranya pelayanan administrasi perakntoran	Persentase layanan administrasi umum perkantoran yang dilaksanakan	100%	Kabag Umum	56,624,537,618.00
Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%		
Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75%		
Terselenggaranya Tatakelola administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		
Fasilitasi Penataan oragniasi dan tata laksana perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	100%	Kabag Organisasi	1,175,006,362.00
Fasilitasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	100%		
Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	100%		
Peningkatan Layanan Keprotokolan KDH dan WKDH	Jumlah event peringatan hari besar nasional/ daerah	5 PHBN/D	Kasubag Protokol	1,443,638,445.00
	Jumlah kunjungan kerja KDH/WKDH yang difasilitasi	200 kegiatan		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan	100%	Kasubag Tata Usaha	33,976,286,992.00
Terlaksananya pemenuhan pelayanan umum dan tata usaha perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan tata usaha dan umum	100%		

## BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Utama Organisasi (IKU)

Pada tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna berhasil menunjukkan capaian kinerja yang signifikan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui koordinasi yang solid, pelaksanaan tugas-tugas strategis berhasil diwujudkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian ini tidak hanya mencerminkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah, tetapi juga memperlihatkan komitmen yang tinggi dalam mendukung keberhasilan program prioritas pembangunan daerah. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Sekretariat Daerah terus berkontribusi sebagai penggerak utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah capain kinerja Sekretariat Darah tahun 2024.

**Tabel 5. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Sekretariat Daerah 2024**

SASARAN	INDIKATOR	2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	95%	96.55%	101.6%
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	76.90	74.31	96.6%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3.34	3.17	94.9%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3.48	3.5	100.6%

Sekretariat Daerah memiliki 4 (empat) sasaran utama yang menjadi indikator kinerja utama Sekretaris Daerah. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel.1 bahwa rata-rata kinerja indikator sasaran 98.4%. Dua dari empat indikator yaitu nilai SAKIP Daerah dan Nilai LPPD realisasinya belum mencapai target, dengan tingkat capaian kinerja >90%.

**Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022-2024**

SASARAN	INDIKATOR	Realisasi			Rata-rata Capaian
		2022	2023	2024	%
Meningkatnya pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	94.82%	96.16%	96.55%	95.84%
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	73.84	73.98	74.31	74.04
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EPPD dalam LPPD	3.31	2.09	3.17	2.86
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3.41	3.71	3.5	3.54

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa relisasi kinerja indikator mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu untuk indikator pembinaan TPQ/TPA, Nilai SAKIP Daerah dan Nilai LPPD. Peningkatan realisasi ini disebabkan adanya kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pembinaan TPQ/TPA dilakukan melalui kebijakan pemberian bantuan operasional kepada TPQ di daerah. Dan Mendorong lembaga TPQ/TPA yang belum aktif untuk mengajukan bantuan operasional. Total TPQ yang mendapat bantuan hibah uang operasional yaitu 28 TPQ dari 29 TPQ yang ada.
- 2) Peningkatan nilai SAKIP Daerah di tahun 2024 dilakukan melalui dengan ditetapkannya kebijakan kepala daerah dalam bentuk Peraturan Bupati tentang SAKIP (Perbub 66 Tahun 2023). Perolehan nilai SAKIP Daerah tahun 2024 (74.31) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Namun peningkatan ini belum mencapai target (76.90). Sekretariat Daerah harus lebih mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, implementasi pengukuran kinerja dan peningkatan kualitas pelaporan kinerja.
- 3) Nilai LPPD, secara realisasi mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya trobosan yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku koordinator penyusunan LPPD yang melakukan upaya pemenuhan indikator LPPD oleh Perangkat Daerah pengampu indikator LPPD. Namun peningkatan ini belum mencapai target yang ditetapkan (3.34). Hal ini disebabkan oleh masih

kurang optimalnya koordinasi dan fasilitas terhadap OPD Pengampu indikator LPPD.

- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penurunan nilai IKM mengindikasikan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan yang perlu segera diidentifikasi dan ditangani. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan nilai IKM suatu pemerintahan daerah: 1) Aspek prosedur layanan 2) aspek kompetensi SDM, 3) Aspek sarana dan prasarana, 4) Aspek produk layanan. 5) Aspek pengelolaan pengaduan, seperti mekanisme pengaduan yang belum jelas, sulit diakses dll.

**Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra**

SASARAN	INDIKATOR	Target Renstra			Realisasi			Rata-rata Capaian
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	%
Meningkatnya pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	56%	95%	95%	94.82%	96.16%	96.55%	95.84%
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	75.00	76.15	76.90	73.84	73.98	74.31	74.04
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EPPD dalam LPPD	3.32	3.33	3.34	3.31	2.09	3.17	2.86
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.47	3.48	3.41	3.71	3.5	3.54

Berdasarkan data tabel, realisasi indikator untuk setiap sasaran menunjukkan hasil yang beragam terhadap target yang telah ditetapkan. Dalam hal pembinaan TPQ/TPA/MDA di daerah, realisasi persentase pembinaan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian mencapai 95,84% dari target renstra. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 94,82%, terus meningkat menjadi 96,16% pada 2023, dan 96,55% pada 2024. Hal ini mencerminkan bahwa program pembinaan TPQ/TPA/MDA berjalan hampir sesuai target. Namun, kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui nilai SAKIP menunjukkan capaian rata-rata sebesar 74,04%, lebih rendah dari target renstra. Realisasi pada tahun 2022 adalah 73,84%, sedikit meningkat pada 2023 menjadi 73,98%, tetapi kembali menurun menjadi 74,31% pada 2024.

Di sisi lain, penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur melalui nilai EPPD dalam LPPD memiliki rata-rata capaian sebesar 2,86, yang cukup jauh di bawah target renstra. Realisasi pada 2022 adalah 3,31, tetapi turun signifikan menjadi 2,09 pada 2023, dan sedikit meningkat menjadi 3,17 pada 2024. Sementara itu, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan capaian yang baik dengan rata-rata 3,54, melampaui target renstra sebesar 3,48 pada 2024. Nilai kepuasan masyarakat meningkat dari 3,41 pada 2022 menjadi 3,71 pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 3,50 pada 2024. Secara keseluruhan, indikator pembinaan TPQ/TPA/MDA dan kepuasan masyarakat menunjukkan hasil yang baik, sementara indikator SAKIP dan EPPD memerlukan perhatian lebih untuk mencapai target renstra.

**Tabel 8. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra**

SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capain %
Meningkatnya pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	53%	96.55%	68%	141.99%
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	73.48	74.31	80	92.89%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EPPD dalam LPPD	3.32	3.17	3.34	94.91%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.5	3.5	100.00%

Dari data pada tabel 8, maka secara keseluruhan capaian kinerja indikator utama Sekretariat Daerah jika dibandingkan dengan target akhir Resntra terdapat dua indikator sudah mencapai target akhir Renstra dan dua indikator capaian terhadap target akhir Renstra sudah diatas 90%. Dan periode tahun 2025 merupakan periode akhir dari Renstra, sehingga ada optimisme dalam pencapaian indikator sesuai dengan target akhir Renstra.

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat dianalisis bahwa secara umum, realisasi capaian beberapa indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Indikator Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah menunjukkan capaian sebesar 96.55%, melampaui target Renstra sebesar 68%, dengan persentase capaian sebesar 141.99%. Sementara itu, indikator Nilai SAKIP Daerah mencapai 74.31 dari target 80

(92.89%), Nilai EPPD dalam LPPD mencapai 3.17 dari target 3.34 (94.91%), dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik mencapai 3.5 sesuai target yang ditetapkan (100.00%). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan TPQ/TPA/MDA telah berjalan dengan sangat baik, sementara kinerja pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan kinerja yang baik meskipun beberapa di antaranya belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

### 3.2. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja bagi pejabat administrator di lingkungan Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi komitmen dan kesepakatan antara atasan langsung dengan pejabat yang bersangkutan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi dasar dalam mengukur akuntabilitas dan pencapaian hasil kerja pejabat sesuai tugas, fungsi, dan program strategis instansi. Selain itu, perjanjian kinerja juga berfungsi sebagai alat pengawasan, evaluasi, dan pemberian penghargaan atau sanksi berdasarkan tingkat realisasi target yang telah dicapai. Dengan adanya perjanjian kinerja, diharapkan setiap pejabat administrator mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif. Berikut ini capaian perjanjian kinerja lingkungan Sekretariat Daerah tahun 2024 :

**PENGUKURAN KINERJA  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan Kebijakan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan	Dokumen	50.00	78	156.00
<b>Capaian Kinerja</b>						<b>156.00</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	90	90.00
2	Meningkatkan Pengordinasian Pelaksanaan Kebijakan Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persen	100	100	100.00
<b>Capaian Kinerja</b>						<b>90.00</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan dan Administrasi	Perangkat daerah tata kelola yang baik	Persen	100.00	90.86	90.86
<b>Capaian Kinerja</b>						<b>90.86</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penataan Lembaga Keagamaan	Persentase rumah ibadah dan Lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan dana operasional	Persen	100	96.55	96.55
		Cakupan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan	Indeks	11	9	81.82
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>89.18</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota  
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Rp 11,927,770,675.00  
**Realisasi Anggaran Rp 10,568,894,823.00 88.61%**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang di Undangkan	Persen	73%	82.11%	112%
		Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi	Kegiatan	3	0	0.00
<b>Capaian Kinerja</b>						<b>0.00</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota  
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Rp 990,977,831.00 %  
**Realisasi Anggaran Rp 649,504,954.00 66%**

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PERIODE TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Pengekoordinasian Capaian Kinerja LPPD	Perangkat Daerah yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci	persen	100	100	100.00
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	5.00	4	80.00
<b>Capaian Kinerja Rata-rata</b>						<b>90.00</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota			
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Rp	937,424,646.00	
<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>635,825,589.00</b>	<b>67.83%</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BAGIAN KERJASAMA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Periode Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang disepakati.	Persentase	90	120	133%

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			%
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp560.228.810,00		
<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Rp368.034.118,00</b>	<b>65.69%</b>	

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyampaikan pelaporan Pelaksanaan Anggaran	Persentase Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah	Persen	100	87.23	87.23%
2	Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyerapan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan	Persen	95	68	71.58%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	B	B	100.00%
4	Meningkatkan ketepatan pelaksanaan kegiatan Pembangunan	Persentase proyek Infrastruktur yang selesai tepat waktu.	Persen	80	100	125.00%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>86%</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota			%
Kegiatan Pelaksanaan Adminstrasi Pembangunan	Rp	1,005,413,000.00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Rp	230,184,320.00	
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>1,235,597,320.00</b>	
<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>691,852,337.00</b>	<b>55.99%</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PERIODE TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Nilai	23	25.92	112.70
		Kualifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia PBJ	Persen	15	15.52	103.47
		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Persen	35	40	114.29
<b>Capaian Kinerja</b>						<b>110.15</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota			%
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	1,587,306,680.00	
<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>1,161,401,361.00</b>	<b>73.17%</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Periode 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan Pelaksanaan Pengoordinasian Kebijakan Perekonomian Daerah	Implementasi kebijakan perekonomian	Persentase	100	100	<b>100%</b>
2	Peningkatan Pelaksanaan Pengoordinasian Kebijakan Sumber Daya Alam	Implementasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase	100	100	<b>100%</b>
3	Peningkatan Pengawasan Terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)	Jumlah BUMD dan BLUD yang dilakukan pemantauan dan pengawasan	BUMD/BLUD	2	2	<b>100%</b>

Jumlah Anggaran		Anggaran	%
Program Perekonomian dan Pembangunan			
1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		327,518,800.00	
2. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		152,745,670.00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 480,264,470.00</b>	
<b>Realisasi</b>		<b>Rp 379,887,183.00</b>	<b>79%</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Fasilitasi Penataan organisasi dan Tata laksana Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	Persen	100.00	100	100.00
2	Fasilitasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	Persen	100.00	100	100.00
3	Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	Persen	100.00	100	100.00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>100.00</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota			%
Penataan Organisasi	Rp	1,175,066,362.00	
<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>809,492,604.00</b>	<b>68.89%</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokol Terencana yang di Fasilitasi	Persen	85	76.92	90.49
<b>Capaian Kinerja</b>						<b>90.49</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota			%
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	1,443,638,445.00	
<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>1,036,211,679.63</b>	<b>71.8%</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PERIODE TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran	Persenatse layanan adminstrasi umum perkantoran yang dilaksanakan	Persen	100	100	100%
2	Terselenggaranya Pelayanan administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Persen	100	95.00	95%
3	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	85.00	113%
4	Teselenggaranya Tatakelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	90.00	90%
<b>Capaian Kinerja</b>						<b>100%</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran

Rp 56,624,537,618.00

Realisasi Anggaran

Rp 42,779,396,994.00 75.55%

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PERIODE TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenatse pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	Persen	100	100	100%
2	Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Umum dan Tata Usaha Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Tata usaha dan Umum	Persen	100	95.00	95%
<b>Capaian Kinerja</b>						<b>98%</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rp 22,427,518,036.00

Realisasi Anggaran

Rp 19,287,140,440.00 86.00%

**PENGUKURAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN PRTOTOKOL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PERIODE TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Layanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Event Peringatan Hari Besar Nasional / Daerah	Jumlah PHBN/D	5	26	520%
		Jumlah Kunjungan Keja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	Kegiatan	200	391.00	196%
<b>Capaian Kinerja Rata-rata</b>						<b>358%</b>

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	1,443,638,445.00	
<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>1,104,805,400.62</b>	<b>76.53%</b>

Capaian realisasi fisik kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan rata-rata realisasi mencapai 127%. Tingginya capaian ini merupakan refleksi dari kinerja optimal seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Realisasi fisik tersebut diukur berdasarkan indikator-indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja, yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Hasil ini mencerminkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Keberhasilan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang.

### **3.3. Realisasi Anggaran**

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan organisasi dalam merencanakan dan mengendalikan operasi suatu organisasi. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Berikut ini adalah anggaran dan realisasi anggaran program kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2024.

pada penetapan APBD tahun 2024 anggaran Sekretariat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 62,9 miliar. Kemudian pada APBD Perubahan tahun 2024 Anggaran naik sebesar 27% menjadi Rp. 76,9 miliar. Penambahan anggaran terjadi untuk seluruh Unit Kerja di Sekretariat Daerah. Penambahan anggaran tidak mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja karena penambahan lebih bersifat kepada anggaran penunjang, bukan anggaran pendukung indikator kinerja utama (IKU).

**Tabel 9. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Setda Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>A</b>	<b>PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	<b>59,473,426,745.00</b>	<b>46,675,976,302.00</b>	<b>78.5%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230,184,320.00	105,782,728.00	46.0%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,427,518,036.00	20,730,789,949.00	92.4%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,715,000.00	22,796,590.00	82.3%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,726,369,128.00	4,550,996,426.00	79.5%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,944,325,820.00	856,755,674.00	29.1%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,231,899,828.00	5,685,308,353.00	91.2%
7	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,595,886,410.00	5,340,280,561.00	62.1%
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10,670,823,396.00	7,468,968,017.00	70.0%
9	Penataan Organisasi	1,175,066,362.00	809,492,604.00	68.9%
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1,443,638,445.00	1,104,805,400.00	76.5%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>14,416,401,962.00</b>	<b>12,206,563,913.00</b>	<b>84.7%</b>
11	Administrasi Tata Pemerintahan	937,424,646.00	678,405,403.00	72.4%
12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11,927,770,675.00	10,537,831,427.00	88.3%
13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	990,977,831.00	649,504,954.00	65.5%
14	Fasilitasi Kerjasama Daerah	560,228,810.00	340,822,129.00	60.8%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>3,072,984,150.00</b>	<b>2,111,380,894.00</b>	<b>68.7%</b>
15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	327,518,800.00	245,356,729.00	74.9%
16	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,005,413,000.00	586,069,690.00	58.3%
17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,587,306,680.00	1,151,601,361.00	72.6%
18	Pemantauan Kebijakan SDA	152,745,670.00	128,353,114.00	84.0%
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>76,962,812,857.00</b>	<b>60,993,921,109.00</b>	<b>79.3%</b>

Realisasi anggaran Sekretariat Daerah tergolong rendah yaitu hanya 79,25% (Rp.60,9 miliar). Hal ini disebabkan terjadinya penundaan bayar terhadap pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan seperti pembayaran tunjangan penambahan penghasilan (TPP), honorarium, perjalanan dinas, dan pengadaan barang dan jasa

lainnya. Jumlah total tunda bayar realisasi belanja Sekretariat Daerah yaitu mencapai Rp. 5,7 miliar di luar TPP dengan rincian setiap Unit kerja sebagai berikut :

**Tabe 10. Jumlah Tunda Bayar Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2024**

<b>Bagian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Pengadaan Barang dan Jasa	47,2 juta
Kerja sama	3,9 juta
Protokol Pimpinan	50,3 juta
Kesejahteraan Rakyat	284,4 juta
Administrasi Pembangunan	46,6 juta
Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5,5 juta
Organisasi	103,5 juta
Hukum	39,2 juta
Tata Pemerintahan	171,6 juta
Umum dan Administrasi	5,02 miliar

Tunda bayar terhadap belanja barang dan jasa merupakan langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia no 89/TH/ 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2024, ditetapkan pada 25 Oktober 2024. Kebijakan pemerintah pusat tersebut memberikan dampak terhadap realiasi keuangan daerah menjadi rendah yaitu hanya 79.3%.

### **Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan sebuah langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Tujuan utama dari penetapan IKU adalah ganda, yaitu: pertama, menyediakan informasi kinerja yang esensial dan relevan guna menunjang penyelenggaraan manajemen kinerja yang optimal; dan kedua, menghasilkan tolok ukur yang valid dan reliabel

terhadap tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Informasi kinerja yang diperoleh melalui IKU akan menjadi landasan bagi proses evaluasi, monitoring, dan pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, IKU berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada publik.

Implementasi dan pencapaian IKU tidak dapat dipisahkan dari dukungan sumber daya yang memadai. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program dan kegiatan yang terencana dan terukur, serta alokasi anggaran yang proporsional dan efektif. Program dan kegiatan yang dirancang harus secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian target-target IKU yang telah ditetapkan. Sementara itu, alokasi anggaran yang tepat sasaran akan memastikan ketersediaan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Keterpaduan antara IKU, program kegiatan, dan alokasi anggaran merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan dan saling memperkuat dalam upaya mewujudkan kinerja organisasi yang optimal dan akuntabel.

Realisasi anggaran program kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 15,3 miliar, realisasi penyerapan mencapai Rp. 12,6 miliar atau sekitar 82,8% (Tabel 10). Angka ini mencerminkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian target IKU, meskipun terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2,7 miliar yang belum terserap. Kendala dalam penyerapan anggaran kemungkinan terkait dengan faktor teknis, administrasi, atau pelaksanaan di lapangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Ke depan, diperlukan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih terukur agar pemanfaatannya dapat mendekati 100%, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

**Tabel 11. Realisasi Anggaran Program Kegiatan Pendukung IKU**

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	<b>1.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>10,067,194,255.00</b>	<b>9,115,465,427.00</b>	<b>90.5%</b>
	1.1.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10,067,194,255.00	9,115,465,427.00	90.5%
	1.1.1.Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spritual	10,067,194,255.00	9,115,465,427.00	90.5%
Nilai LPPD	<b>1.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>1,445,942,791.00</b>	<b>989,238,655.00</b>	<b>68.4%</b>
	1.1.Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	222,775,100.00	204,468,482.00	91.8%
	1.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	222,775,100.00	204,468,482.00	91.8%
	1.2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	662,938,881.00	443,948,044.00	67.0%
	1.2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	550,571,520.00	375,600,044.00	68.2%
	1.2.2. Sub Kegiatan Pendokumentasian PHD dan Pengelolaan Informasi Hukum	112,367,361.00	68,348,000.00	60.8%
	1.3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	560,228,810.00	340,822,129.00	60.8%
	1.3.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	444,296,540.00	240,886,940.00	54.2%
	1.3.2. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	115,932,270.00	99,935,189.00	86.2%
Nilai SAKIP Daerah	<b>2.Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>2,920,238,480.00</b>	<b>1,983,025,699.00</b>	<b>67.9%</b>
	2.1. Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa	1,587,306,680.00	1,151,601,361.00	72.6%
	2.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1,001,576,660.00	795,543,584.00	79.4%
	2.1.2. Sub Keg Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	585,730,020.00	356,057,777.00	60.8%
	2.2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,005,413,000.00	586,069,609.00	58.3%
	2.2.1. Sub Keg Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	504,069,240.00	321,382,321.00	63.8%
	2.2.2. Sub Keg Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	501,343,760.00	264,687,288.00	52.8%
	2.3.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	327,518,800.00	245,354,729.00	74.9%
	2.3.1. Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi, Monev kebijakan pengelolaan BUMD, BLUD	129,704,600.00	66,454,900.00	51.2%
	2.3.2. Sub Keg Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	197,814,200.00	178,899,829.00	90.4%
	<b>3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>881,835,862.00</b>	<b>595,897,703.00</b>	<b>67.6%</b>
	3.1. Kegiatan Penataan Organisasi	651,651,542.00	490,114,975.00	75.2%
	3.1.1 Sub Keg Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	271,800,722.00	204,384,458.00	75.2%
	3.1.2. Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	128,004,860.00	110,722,323.00	86.5%
	3.1.3. Sub Keg Fasilitasi Layanan Publik dan Tata Laksana	251,845,960.00	175,008,194.00	69.5%
	3.2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230,184,320.00	105,782,728.00	46.0%
3.2.1. Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Pd	230,184,320.00	105,782,728.00	46.0%	
<b>Jumlah</b>	<b>15,315,211,388.00</b>	<b>12,683,627,484.00</b>	<b>82.8%</b>	

## Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon III (UKE-III)

Berikut ini adalah realisasi penyerapan anggaran unit kerja eselon III (UKE-III) di Sekretariat Daerah tahun 2024 :

**Tabel 12. Penyerapan Anggaran Unit Kerja Eselon III Sekretariat Daerah**

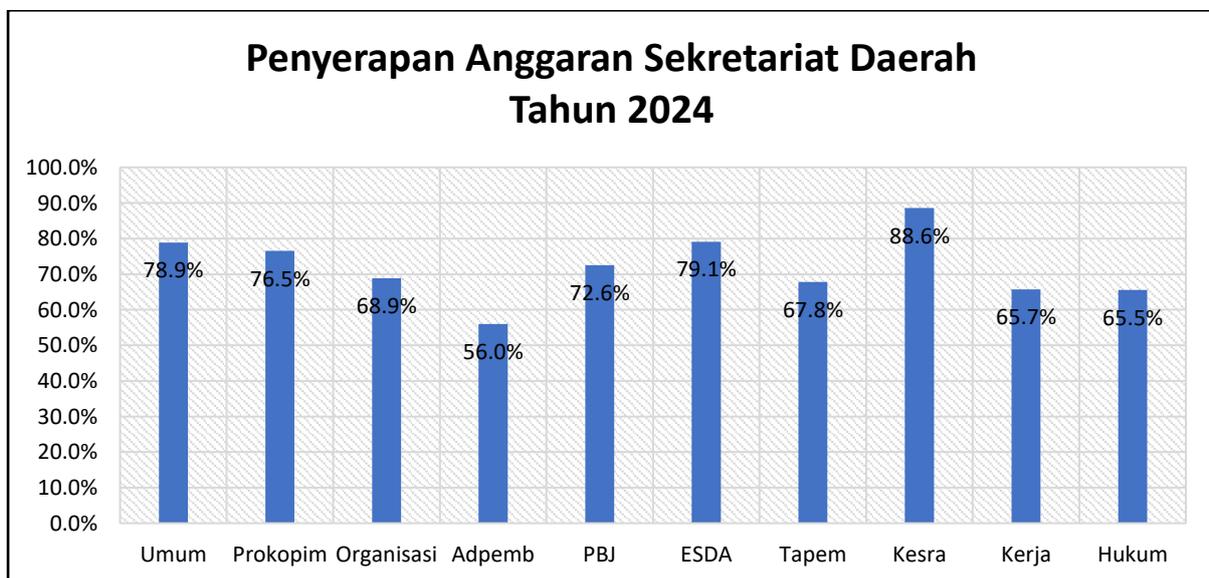
Unit Kerja Eselon III (UE-3)	Anggaran	Realisasi	%
Bagian Umum	Rp 56,624,537,618.00	Rp 44,655,886,570.00	78.9%
Bagian Prokpom	Rp 1,443,638,445.00	Rp 1,104,805,400.00	76.5%
Bagian Organisasi	Rp 1,175,066,362.00	Rp 809,492,604.00	68.9%
Bagian Administrasi Pembangunan	Rp 1,235,597,320.00	Rp 691,852,337.00	56.0%
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1,587,306,680.00	Rp 1,151,601,361.00	72.6%
Bagian Perekonomian dan SDA	Rp 480,264,470.00	Rp 379,887,183.00	79.1%
Bagian Tata Pemerintahan	Rp 937,424,646.00	Rp 635,825,589.00	67.8%
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 11,927,770,675.00	Rp 10,568,894,823.00	88.6%
Bagian Kerjasama	Rp 560,228,810.00	Rp 368,034,118.00	65.7%
Bagian Hukum	Rp 990,977,831.00	Rp 649,504,954.00	65.5%
<b>JUMLAH</b>	<b>76,962,812,857.00</b>	<b>61,015,784,939.00</b>	<b>79.3%</b>

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat dianalisis bahwa realisasi anggaran dari beberapa Unit Kerja Eselon III (UE-3) di Sekretariat Daerah menunjukkan variasi tingkat penyerapan. Bagian Kesejahteraan Rakyat mencatatkan realisasi tertinggi dengan 88,6%, diikuti oleh Bagian Perekonomian dan SDA dengan 79,1%, serta Bagian Umum dengan 78,9%. Sementara itu, beberapa bagian lain seperti Bagian Administrasi Pembangunan (56,0%), Bagian Kerjasama (65,7%), dan Bagian Hukum (65,5%) menunjukkan tingkat realisasi yang relatif lebih rendah. Secara keseluruhan, total realisasi anggaran dari seluruh UE-3 mencapai 79,3% dari total anggaran yang dialokasikan, mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi optimalisasi penyerapan anggaran pada beberapa unit kerja untuk periode yang bersangkutan.

Realisasi anggaran yang belum optimal pada periode ini diindikasikan kuat berkaitan dengan implementasi kebijakan penundaan penyaluran anggaran ke daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan ini didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89/TH/2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024. Regulasi ini secara langsung memengaruhi arus kas daerah dan berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah direncanakan.

Konsekuensi dari penundaan penyaluran anggaran tersebut berimplikasi pada dua aspek utama, yaitu penundaan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa kepada pihak mitra pemerintah daerah serta penundaan pembayaran tunjangan pegawai. Penundaan pembayaran kepada mitra berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran aktivitas ekonomi di tingkat daerah dan dapat memengaruhi kepercayaan pihak swasta dalam bermitra dengan pemerintah. Sementara itu, penundaan pembayaran tunjangan pegawai dapat memengaruhi motivasi dan kinerja aparatur sipil negara, yang pada gilirannya dapat berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

**Gambar 1. Grafik Penyerapan Anggaran Antar Bagian**



Untuk menentukan apakah suatu anggaran dapat dikatakan efektif dan efisien, terdapat beberapa kriteria dan indikator yang perlu diperhatikan. Tidak ada angka tunggal yang mutlak ideal, karena efektivitas dan efisiensi anggaran bersifat kontekstual dan bergantung pada tujuan yang ingin dicapai serta sumber daya yang tersedia. Namun, ada beberapa panduan umum yang bisa digunakan:

## 1) Efektivitas Anggaran

Efektivitas mengukur sejauh mana anggaran yang dialokasikan berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas biasanya diukur dengan membandingkan antara *output* (hasil yang dicapai) dengan *target* yang telah ditetapkan.

Persentase Realisasi	Tingkat Efektivitas	Keterangan
Di atas 100%	Sangat Efektif	Melebihi target yang ditetapkan.
90% - 100%	Efektif	Mencapai target atau mendekati target.
80% - 90%	Cukup Efektif	Sebagian besar target tercapai.
60% - 80%	Kurang Efektif	Target belum tercapai secara optimal.
Di bawah 60%	Tidak Efektif	Target jauh dari harapan atau tidak tercapai.

## 2) Efisiensi Anggaran

Efisiensi mengukur bagaimana sumber daya (anggaran) digunakan secara optimal untuk menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang minimal. Indikator efisiensi biasanya diukur dengan membandingkan antara *input* (biaya yang dikeluarkan) dengan *output* (hasil yang dicapai).

Persentase Realisasi terhadap Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Di atas 100%	Tidak Efisien	Biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran yang dialokasikan. Hal ini mengindikasikan adanya <i>overspending</i> dan perlu dievaluasi penyebabnya.
90% - 100%	Kurang Efisien	Penggunaan anggaran mendekati alokasi maksimal, namun masih terdapat potensi inefisiensi atau pemborosan. Perlu ditelaah lebih lanjut apakah <i>output</i> yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
80% - 90%	Cukup Efisien	Penggunaan anggaran cukup terkendali dan masih dalam batas yang wajar. Namun, tetap perlu diupayakan peningkatan efisiensi agar penggunaan sumber daya lebih optimal.
60% - 80%	Efisien	Penggunaan anggaran terkendali dan menghasilkan <i>output</i> yang memadai. Tingkat efisiensi ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik.
Di bawah 60%	Sangat Efisien	Penggunaan anggaran sangat hemat dan menghasilkan <i>output</i> yang signifikan. Tingkat efisiensi ini sangat baik, namun perlu dipastikan bahwa penghematan tersebut tidak mengorbankan kualitas <i>output</i> atau pencapaian target. Perlu juga dianalisis apakah penghematan ini memang direncanakan atau ada faktor lain yang mempengaruhinya (misalnya, penundaan kegiatan).

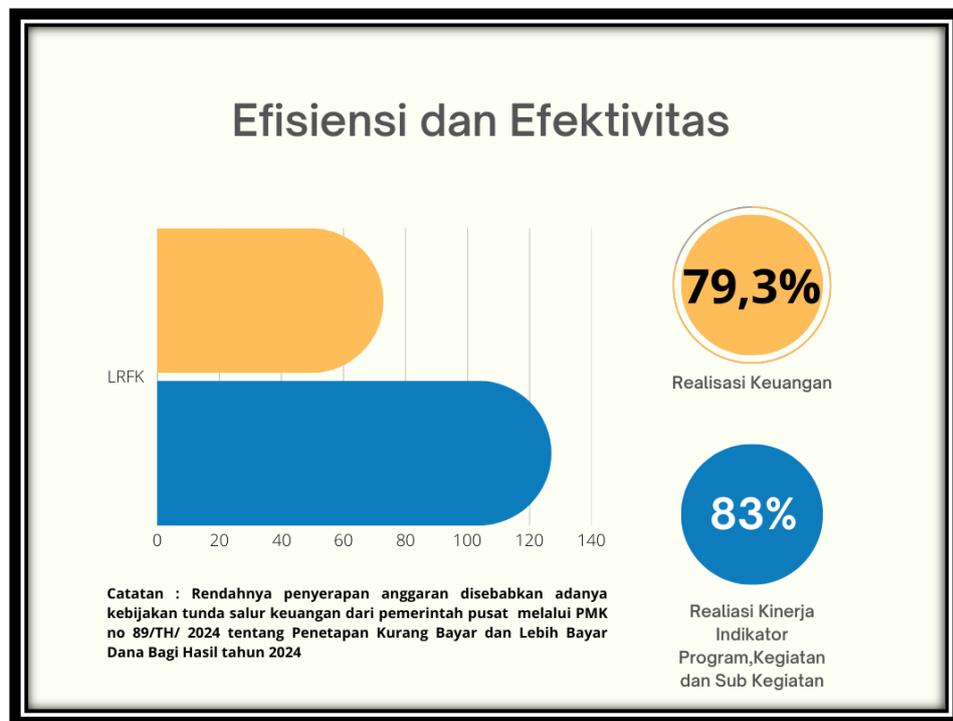
**Tabel 13. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran**

Unit	Realisais %	Keterangan
Umum	78.9%	Kurang Efektif / Efisien
Prokopim	76.5%	Kurang Efektif / Efisien
Organisasi	68.9%	Kurang Efektif / Efisien
Adpemb	56.0%	Kurang Efektif / Sangat Efisien
PBJ	72.6%	Kurang Efektif / Efisien
ESDA	79.1%	Kurang Efektif / Efisien
Tapem	67.8%	Kurang Efektif / Efisien
Kesra	88.6%	Efektif / Cukup Efisien
Kerja	65.7%	Kurang Efektif / Efisien
Hukum	65.5%	Kurang Efektif / Efisien

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat dianalisis bahwa tingkat realisasi anggaran pada beberapa unit kerja menunjukkan variasi. Sebagian besar unit kerja, seperti Bagian Umum (78,9%), Prokopim (76,5%), Organisasi (68,9%), PBJ (72,6%), ESDA (79,1%), Tapem (67,8%), Kerjasama (65,7%), dan Hukum (65,5%), berada pada kategori "kurang efektif" dan "efisien". Bagian Administrasi Pembangunan (Adpemb) dengan realisasi 56,0% tergolong "kurang efektif" namun berpotensi "sangat efisien". Sementara itu, hanya Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang menunjukkan kinerja "efektif" dengan realisasi 88,6%, meskipun tingkat efisiensinya dinilai "cukup efisien". Secara keseluruhan, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja masing-masing unit kerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat realisasi anggaran dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran terkendali dan menghasilkan *output* yang memadai. Tingkat efisiensi rata rata pada angka 60-80% ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang bai, Dimana dengan penggunaan anggaran yang minimal dapat menghasilkan output kerja yang signifikan. Tingkat efisiensi ini sangat baik, namun perlu dipastikan bahwa penghematan tersebut tidak mengorbankan kualitas *output* atau pencapaian target. Tingkat efisiensi dan efektifitas ini ada faktor lain yang mempengaruhinya yaitu penundaan pembayaran realisasi belanja.

Dalam situasi di mana realisasi anggaran rendah karena kebijakan tunda bayar meskipun kegiatan/belanja sudah selesai dilaksanakan (realisasi fisik), pengukuran efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran memerlukan penyesuaian. Fokusnya bergeser dari sekadar melihat angka realisasi keuangan menjadi mempertimbangkan pencapaian *output* dan dampak kegiatan yang telah dilaksanakan.



Capaian realisasi fisik kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik mencapai 83%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja, yang menjadi ukuran pencapaian setiap unit kerja belum sepenuhnya maksimal. Namun demikian, realisasi keuangan yang mencapai 79,3% menunjukkan adanya disparitas antara output fisik dan serapan anggaran. Hal ini mengindikasikan perlunya penajaman strategi pengelolaan keuangan agar selaras dengan tingkat pelaksanaan fisik kegiatan, sehingga kinerja secara keseluruhan dapat tercapai secara efisien dan efektif sesuai prinsip akuntabilitas.

## **BAB 4. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Melalui koordinasi yang solid dan implementasi tugas-tugas strategis yang cermat, Sekretariat Daerah mampu menghasilkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah. Komitmen yang tinggi dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah termanifestasi dalam upaya bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Capaian ini memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah untuk terus berkontribusi sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan kinerja organisasi yang optimal.

Dalam konteks evaluasi kinerja organisasi, penting untuk terus mempertahankan momentum positif yang telah dicapai serta merumuskan strategi perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang teridentifikasi. Dengan demikian, Sekretariat Daerah perlu terus mengoptimalkan upaya dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi mendalam terhadap realisasi anggaran, peningkatan efektivitas, dan efisiensi program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik akan menjadi fokus utama dalam memperkuat fondasi kinerja organisasi ke depan. Dengan kerjasama yang solid dan komitmen yang kuat, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna diharapkan dapat terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 4.2. Rekomendasi

Rekomendasi dapat menjadi panduan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam menghadapi tantangan dan memperkuat kinerja organisasi di masa mendatang untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna di masa mendatang, berdasarkan isi laporan yang telah disajikan:

1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Antar unit kerja:
  - a) Perkuat mekanisme koordinasi antar unit kerja untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan.
  - b) Tingkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja untuk memastikan program dan kegiatan berjalan secara sinergis.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):
  - a) Fokus pada peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang terarah.
  - b) Pastikan distribusi SDM yang merata di setiap unit kerja untuk optimalisasi kinerja dan efisiensi organisasi.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi:
  - a) Perkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan secara efektif.
  - b) Tingkatkan transparansi informasi terkait kinerja organisasi dan penggunaan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan publik.
4. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran:
  - a) Perkuat mekanisme perencanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan data dan informasi yang akurat.
  - b) Tingkatkan efisiensi pengalokasian anggaran dengan prioritas yang jelas dan koordinasi yang baik antar unit kerja.
5. Peningkatan Kepuasan Masyarakat:
  - a) Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan layanan dukungan administrasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - b) Perkuat mekanisme pengelolaan pengaduan untuk memastikan responsifitas dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ranai, 10 Januari 2025

Sekretaris Daerah,



**BOY WIJANARKO VARIANTO, S.E.**  
NIP. 19770809 200212 1005